

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada 1 Januari Tahun 2001 diberlakukan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Masyarakat juga semakin menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan daerah .

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal atau maksimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Menurut Nasaruddin (2008) “sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan”.



**TABEL 1.1****Research Gap**

| No | Variabel       | Penelitian Terdahulu                                                                                                              | Hasil                                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kompetensi SDM | Tutun Hermawanto Botutihe (2013), Liza Rahayu (2014), As Syifa Nurillah (2014), Dewi Andini (2015), Luh Kadek Sri Megawati (2015) | Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah |
|    |                | Akhmad (2014)                                                                                                                     | Kompetensi SDM dan peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD       |
| 2  | SAKD           | Tutun Hermawanto Botutihe (2013), Liza Rahayu (2014), As Syifa Nurillah (2014), Dewi Andini (2015), Luh Kadek Sri Megawati (2015) | SAKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah           |
|    |                | Lilis dan Wiken (2014)                                                                                                            | SAKD tidak pengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD                                             |

Sumber: Berbagai macam penelitian jurnal terdahulu

Sistem akuntansi keuangan daerah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah ( kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan (Abdul Halim, 2013 : 43).

Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya yang sangat diperlakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Maka laporan keuangan perlu adanya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku dalam sistem akuntansi pemerintah (SAP). Akuntabilitas adalah menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

**TABEL 1.2****Data LHP Penilaian Kualitas Laporan Keuangan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi****Jawa Tengah Tahun 2016 :**

## 1. Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WDP

| No | Nama Kabupaten/Kota | LHP Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Pemkab Rembang      | WDP (Wajar Dengan Pengecualian)                        |
| 2  | Pemkab Klaten       | WDP (Wajar Dengan Pengecualian)                        |
| 3  | Pemkot Tegal        | WDP (Wajar Dengan Pengecualian)                        |

## 2. Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP

| No | Nama Kabupaten/Kota | LHP Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Pemkot Semarang     | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 2  | Pemkab Semarang     | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 3  | Pemkab Demak        | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 4  | Pemkab Pati         | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 5  | Pemkab Kudus        | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 6  | Pemkab Jepara       | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 7  | Pemkab Sukoharjo    | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 8  | Pemkab Wonogiri     | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 9  | Pemkab Temanggung   | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 10 | Pemkab Wonosobo     | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 11 | Pemkab Banjarnegara | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |
| 12 | Pemkab Magelang     | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)                         |

|    |                    |                                |
|----|--------------------|--------------------------------|
|    |                    | Pengecualian)                  |
| 13 | Pemkot Magelang    | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 14 | Pemkab Cilacap     | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 15 | Pemkab Purbalingga | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 16 | Pemkab Kendal      | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 17 | Pemkab Pekalongan  | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 18 | Pemkot Pekalongan  | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 19 | Pemkab Pemalang    | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 20 | Pemkab Tegal       | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 21 | Pemkab Banyumas    | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |

Sumber: LHP LKPD TAHUN 2016

Pada tahun 2016 jumlah Pemerintah Daerah yang telah diperiksa dan mendapatkan opini WTP adalah sebanyak 21 Pemda, atau sebesar 88,57%. Dengan demikian, terdapat peningkatan 28,57%. Sementara itu sisanya sebanyak 3 (tiga) Pemda yang masih mendapatkan opini WDP.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala OPD bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala OPD dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala OPD melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggung jawabkan kepada bupati/ walikota/ gubernur.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih Kabupaten Demak. Namun demikian, bukan berarti bahwa predikat tersebut menjadikan seluruh aparatur pemerintah di

Kabupaten Demak bekerja dengan santai. Justru predikat WTP harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi, karena untuk kedepannya predikat ini harus dipertahankan, bahkan untuk selamanya Demak berpredikat WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2016 yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Keuangan Pemerintah diserahkan oleh Auditor Utama BPK RI Pusat Bambang Pamungkas kepada Bupati HM. Natsir di Kantor BPK Provinsi Jawa Tengah.

Opini WTP merupakan bukti laporan keuangan Kabupaten Demak sudah baik dan akuntabel. Opini WTP tersebut merupakan sebuah penghargaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Dari hasil pemeriksaan BPK untuk Kabupaten Demak sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, Pemkab hanya mendapatkan opini WDP. Di tahun 2016 predikatnya naik menjadi WTP.” Upaya pertama yang dilakukan adalah menentukan visi dan misi. Visinya adalah WTP Harga Mati, sedangkan misinya adalah membentuk satuan tugas WTP dan penataan asset”. Tujuannya untuk memberi semangat kepada semua aparatur agar mempunyai tekad yang sama untuk mencapai WTP.

Pemilihan BPKPAD di salah satu dari OPD Kabupaten Demak sebagai objek penelitian karena provinsi Jawa Tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dengan adanya peningkatan 28,57% dan salah satunya adalah Kabupaten Demak berhasil meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada kabupaten Demak, sehingga penelitian ini diberi judul:

**“ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada BPKPAD Kabupaten Demak)”**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak.
2. Apakah ada pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak.
3. Apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak.

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang ada diatas, problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Demak.

Berdasarkan problem yang terjadi diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Lapora Keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun secara praktis dan secara teoritis.

Adapun manfaat atau kegunaan yang didapat antara lain:

#### **A. Kegunaan Teoritis/Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi agar dapat lebih baik untuk masa yang akan datang .

#### **B. Kegunaan Praktis/Empiris**

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai kompetensi sumber daya manusia dan paenerapan sistem

akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

- b. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bagi Pemerintah Daerah
- a. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan penempatan sumber daya manusia yang kompeten dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, yang nantinya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kompetensi sumber daya manusia, peranan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Kota Demak.

### 3. Bagi instansi pendidikan

- a. Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dan acuan mengenai kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- b. Sebagai referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan memacu pada penelitian yang lebih baik.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai telaah pustaka sebagai dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Dalam bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpuln data, serta metode analisis yang digunakan.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian mendatang.

